

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Covid-19 adalah sebuah penyakit yang hingga saat ini masih menggerahkan masyarakat dunia khususnya warga Indonesia. Masalah ini awalnya di kota Wuhan cina di sejak dari akhir Januari sampai dengan awal Febuari 2020. Laporan mengenai kasus covid-19 datang dari wilayah Hubai hingga menyebar ke berbagai provinsi diseluruh Negara China, dan pada akhirnya penyebaran virus tersebut mulai tersebar luas hingga ke seluruh negara di dunia. (Susilo, dkk.2020:45-46). Mulai tanggal 30 januari 2020, WHO menetapkan penyakit sebagai masalah publik dan pada tanggal 12 Febuari 2020 WHO resmi menetapkan penyakit corona virus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Desiase (Covid-19).

Penyebaran virus covid-19 di negara Indonesia sampai saat ini terus menyebar luas bukan hanya tersebar di perkotaan penyebaran ini meluas hingga ke pedesaan yang mengakibatkan ribuan bahkan ratusan ribu orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Selain berdampak kepada kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan oleh permasalahan ekonomi dan sosial juga ada dimana- mana. oleh karena itu pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan yang bertujuan mencegah penyebaran serta menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari virus corona melalui undang-undang peraturan presiden, menteri, surat edaran sampai keputusan yang dikeluarkan oleh kapolri no Mak/2/III/2020 mengenai kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona.

Kasus positif covid-19 semakin menyebar dan terus mengalami peningkatan yang pesat di berbagai kota maupun daerah seperti di sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Sejak april 2020 beberapa wilayah di Sumatera Selatan masuk ke dalam zona merah diantaranya yaitu kota Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ulu (OKU) dan Banyuasin. Hal ini karena cepatnya penularan

virus covid-19 yang mengakibatkan Sumatera Selatan berada di urutan ke-7 dalam kasus konfirmasi tertinggi yang ada di Indonesia. Sejak diberlakukannya pembatasan berupa Lockdown yang menutup akses pada suatu wilayah berakibat proses produksi terhenti, rantai pasokan barang dan jasa terganggu, sehingga menimbulkan terganggunya aktivitas ekonomi. Kebijakan dalam jangka pendek juga dilakukan dengan memberlakukan pemberian bantuan secara sosial tunai, seperti sembako dan bantuan listrik gratis.

Potensi Perubahan APBD demi menghadapi risiko pandemi Covid-19 mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah serta dapat memberi ancaman semakin memburuknya sistem ekonomi domestik. Dalam konteks krisis pandemi covid-19 di Indonesia berdebat tentang mana yang harus diutamakan kesehatan ataukah ekonomi yang dimana ekonomi sebagai sesuatu yang sangat sempit terutama dengan pendapatan asli daerah, dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber di mana pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Arfah et al., 2021).

Fenomena COVID-19 memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan. Penyebaran virus ini telah menyebabkan berbagai perubahan dalam perekonomian dan aktivitas bisnis yang tercermin dalam laporan keuangan daerah, seperti penurunan pendapatan pajak daerah, dan untuk mengatasi penurunan pendapatan beberapa daerah mungkin perlu mengambil langkah-langkah meminjam lebih banyak uang hal ini dapat mengakibatkan utang daerah yang nantinya akan mempengaruhi beban pembayaran utang di laporan keuangan, peningkatan pengeluaran tambahan diperlukan untuk membeli peralatan medis, perlengkapan pelindung dan mendukung layanan kesehatan hal ini dapat mempengaruhi anggaran keuangan daerah pandemi covid-19 juga menghambat investasi dan proyek-proyek pembangunan ekonomi lokal ketidakpastian ekonomi dapat membuat investor ragu mengakibatkan pembatalan proyek investasi

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber

pendapatan utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 juga berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan
2017-2021
(Triliun Rupiah)

Tahun	Rata-rata
2017	5.280.000.000.000
2018	6.370.000.000.000
2019	6.070.000.000.000
2020	5.240.000.000.000
2021	6.140.000.000.000

Data diolah 2023

Pada tabel 1.1 tahun 2017 PAD Sumatera Selatan mencapai sekitar Rp 5,28 triliun. Pada tahun ini pandemi COVID-19 belum melanda Indonesia sehingga pendapatan daerah belum terdampak oleh pandemi. Pada Tahun 2018 PAD Sumatera Selatan mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp 6,37 triliun. Tahun 2019 PAD Sumatera Selatan mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 6,07 triliun Pada Tahun 2020 Pandemi COVID-19 sudah mulai terjadi namun belum terlalu berdampak pada pendapatan daerah kemudian setelahnya PAD Sumatera Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sekitar Rp 5,24 triliun. Banyak usaha yang terpaksa tutup atau mengalami penurunan pendapatan sehingga pajak dan retribusi yang dibayarkan ke daerah juga menurun dan pada tahun terakhir 2021 pandemi COVID-19 masih berlangsung tetapi sudah ada upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pendapatan daerah mulai kembali meningkat sehingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp 6,14 triliun. Meskipun demikian pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah masih jauh dari target karena sektor pariwisata yang menjadi salah satu penghasil utama pendapatan tersebut masih belum pulih sepenuhnya. Secara keseluruhan, pandemi

COVID-19 berdampak pada pendapatan asli daerah Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai 2021 dengan terjadi penurunan pada tahun 2020 dan pemulihan pada tahun 2021. Meskipun demikian, dampak pandemi tidak hanya terasa pada sektor pajak dan retribusi daerah tetapi juga pada sektor lain seperti pengelolaan kekayaan daerah, terutama sektor pariwisata yang terdampak oleh pembatasan sosial dan penutupan tempat wisata.

Tabel 1.2
Dana Alokasi Umum Sumatera Selatan
2017-2021
(Triliun Rupiah)

Tahun	Rata-rata
2017	7.550.000.000.000
2018	8.760.000.000.000
2019	8.530.000.000.000
2020	7.450.000.000.000
2021	8.440.000.000.000

Data diolah 2023

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat DAU Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai 2021 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. DAU untuk Sumsel pada tahun 2017 sekitar Rp 7,55 triliun. Pandemi COVID-19 belum sampai ke Indonesia tahun ini, sehingga DAU tetap berjalan seperti biasa. Setelah 2018 DAU Sumsel meningkat menjadi sekitar Rp 8,76 triliun namun tetap stabil. pada tahun 2019 pandemi COVID-19 terjadi tanpa banyak berdampak pada DAU, sehingga DAU Sumsel sedikit menurun menjadi sekitar Rp 8,53 triliun. Kemudian pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mencapai puncaknya sehingga menyebabkan penurunan DAU Sumsel yang cukup signifikan menjadi kurang lebih Rp 7,45 triliun. Berbagai sektor ekonomi terkena dampaknya, termasuk sektor penerimaan negara yang merupakan sumber utama DAU. Karena ini DAU di Sumsel kembali meningkat menjadi sekitar Rp 8,44 triliun di tahun terakhir pandemi 2021. Pandemi COVID-19 masih ada di tahun 2021, namun pemerintah telah melakukan upaya untuk menghidupkan kembali perekonomian, sehingga penerimaan negara mulai kembali meningkat. Pulihnya sejumlah sektor ekonomi, khususnya sektor pariwisata dan perdagangan, membuat

peningkatan DAU tidak cukup besar. DAU Sumsel terkena dampak pandemi COVID-19 secara keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2021 dengan penurunan pada tahun 2020 dan pemulihan pada tahun 2021 Namun, dampak pandemi tersebut tidak hanya dirasakan pada sektor penerimaan negara tetapi juga pada sektor lainnya.

Tabel 1.3
Dana Alokasi Khusus Sumatera Selatan
2017-2021

(Triliun Rupiah)

Tahun	Rata-rata
2017	2.400.000.000.000
2018	2.630.000.000.000
2019	2.390.000.000.000
2020	2.000.000.000.000
2021	2.170.000.000.000

Data diolah 2023

Pada Tabel 1.3 DAK Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai 2021 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Tahun 2017 DAK Sumatera Selatan sebanyak Rp 2,4 Triliun DAK masih stabil lalu data tahun 2018 DAK Sumatera Selatan mengalami kenaikan menjadi Rp 2,63 Triliun. Tahun 2019 pandemi COVID-19 belum terjadi sehingga DAK masih stabil, Namun di tahun berikutnya yaitu Tahun 2020 DAK sudah menurun dampak dari mulainya Covid meningkat sehingga DAK Sumatera Selatan mengalami penurunan sekitar Rp 2,39 Triliun. Karena puncaknya Covid terjadi di 2020 berbagai sektor perekonomian mengalami dampak yang cukup serius termasuk sektor Negara yang mengalami penurunan secara signifikan sehingga sumber pendapatan utama DAK ikut menurun. DAK Sumatera Selatan kembali pulih 2021 dari mengalami peningkatan menjadi Rp 2,17 Triliun meskipun pandemi belum berakhir namun upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah penerimaan Negara mulai kembali meningkat. Namun kenaikan DAK tidak cukup signifikan karena pendapatan Negara harus terbagi untuk sektor lainnya seperti pariwisata, perdagangan dan sektor lainnya.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, namun penelitian

ini memiliki perbedaan objek pada penelitian ini menggunakan objek di Sumatera Selatan dan menggunakan tahun yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Menurut penelitian Fitri, dkk (2022) menjelaskan bahwa terjadi perbedaan signifikan sebelum dan selama Covid-19 mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi sebelum dan selama Covid-19. Menurut Yulia Indah Sari (2022) Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji beda t dan uji Wilcoxon diketahui bahwa pada variabel Derajat Desentralisasi Fiskal dan variabel Keserasian Belanja Modal terdapat perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anjelia, dkk (2021) mendeskripsikan bahwa pandemic Covid-19 mengakibatkan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan daripada kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tak signifikan. Sedangkan Menurut Fadhilah Nuraini, dkk (2019) hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan Sumatera karena menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Judul ini membahas perbandingan penerimaan keuangan pemerintah daerah, yang merupakan hal yang penting dan relevan saat ini karena pandemi mempengaruhi perekonomian dan penerimaan keuangan pemerintah. Hasil dari skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami perubahan penerimaan keuangan pemerintah selama pandemi dan membuat keputusan yang tepat Skripsi ini membahas perbandingan penerimaan keuangan pemerintah sebelum dan saat pandemi, yang merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena membahas perbandingan anggaran di Sumatera Selatan pada sebelum dan saat pandemi COVID-19. Meskipun pandemi saat ini tidak lagi aktif namun dampak COVID-19 pada perekonomian masih terasa hingga saat ini dan

penelitian ini membantu mengenai kebijakan keuangan daerah pada masa pandemi dapat memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menghadapi situasi serupa di masa depan, Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus sebelum dan saat pandemi di provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan asli daerah sebelum dan saat pandemi di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada dana alokasi umum sebelum dan saat pandemi di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada dana alokasi khusus sebelum dan saat pandemi di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Di dalam suatu penelitian harus terdapat lingkup yang membatasi cakupan yang dibahas dalam penelitian tersebut agar proposal skripsi dapat ditulis lebih terarah dan bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sehingga berdasarkan data yang ada yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus sebelum dan saat pandemi yang terdapat dalam data yang diperoleh website resmi bpk.go.id Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Di dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan Pendapatan asli daerah sebelum dan saat pandemi di Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui perbandingan Dana alokasi umum sebelum dan saat pandemi di Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui perbandingan Dana alokasi khusus sebelum dan saat pandemi di Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Tentunya penelitian akan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai penulis mengharapkan penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis perbandingan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Provinsi Sumatera Selatan
2. Dapat memperkaya bahan perpustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori terkait dengan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
3. Sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan dan membantu pemerintah untuk mengatasi berbagai bencana / pandemi yang akan mendatang khususnya di bidang perekonomian pemerintah daerah